

**KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
DISTRIBUSI PENDAPATAN**

**(Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah 2007-2008 )**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

**Disusun oleh:**

**MARYAM YULIANI  
NIM C2B004176**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Maryam Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B004176  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP  
Judul Skripsi : **KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
(Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota di Jawa  
Tengah 2007-2008)**  
Dosen pembimbing : Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS

Semarang, 22 Februari 2011

(Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS)  
NIP. 131620151

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Maryam Yuliani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B004176  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP  
Judul Skripsi : **KETERKITAN ANTARA PERTUMBUHAN  
EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
(Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota di Jawa  
Tengah 2007-2008)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal JUNI 2011**

Tim penguji :

1. Prof. Dr. F.X Sugiyanto, MS (.....)
2. Dr.Johanna Maria K, MSc. (.....)
3. Drs. Nugroho SBM, MT. (.....)

## PERNYATAAN ORISONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Maryam Yuliani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2007-2008), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

**Semarang, 22 Februari 2011**  
**Yang membuat pernyataan,**

**(Maryam Yuliani)**  
**NIM: C2B004176**

## **ABSTRACT**

*This study aims to know the pattern of interrelatedness between disparity of income distribution with the level of economic growth and percapita income in 35 regencies/ cities of Central Java. The data used are secondary data and the time series of the data are 2007 and 2008.*

*The processing of collecting data is used by DASP (Distributive Analysis Stata Package) and Excel. Methode which used are Gini Rasio Index and Tipology Diagram, consist of 4 (four) quadrant.*

*The result of this study explain that disparity of income distribution in Central Java is low; it is around 0,28 in 2007 and 2008. By tipology diagram we can recognize that the tendency of some regencies/ cities in Central Java are classified in category: low disparity in income distribution with low in economic Growth and low income percapita.*

*Key Word: Disparity of Income Distribution, Economic Growth, Percapita Income, Gini Rasio Index, Central Java*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola keterkaitan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah . Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu tahun 2007 dan tahun 2008.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program DASP (*Distributive Analysis Stata Package*) dan Excel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Gini dan Diagram Tipologi yang terdiri dari empat kuadran.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,28 pada tahun 2007 dan tahun 2008 . Dengan menggunakan diagram tipologi empat kuadran diketahui bahwa beberapa kabupaten/ kota di Jawa Tengah cenderung tergolong kedalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan perkapita rendah.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Indeks Gini, Jawa Tengah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala berkat dan karunia yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah 2007-2008 )”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Alm. Bapak Ahmad Tolani dan Ibu Aisyah, terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang dan doanya yang tiada terputus pada ananda. Alhamdulillah akhirnya ananda dapat menyelesaikan kuliah. Semoga Allah SWT meridhoi niat ananda untuk membalas semua kasih sayang serta doa Bapak dan Ibu.
2. Bapak Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas saran, kritik, diskusi serta perhatiannya selama penulis menyelesaikan skripsi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
3. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
4. Bapak Prof. Prof. Drs. H. Arifin Sabeni, M.Com, Hons., Akt. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah berkenan memberikan ijin penelitian.
5. Drs. H. Edy Yusuf AG, MSc, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Drs. Nugroho SBM, MSP selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani kuliah. Terima kasih atas saran, kritik serta perhatiannya selama penulis menyelesaikan kuliah.
7. Mas Yusuf dan De‘ Hida, terima kasih buat pengertian dan dukungannya.
8. Sahabat-sahabat yang telah penulis repotkan selama menyelesaikan tugas tahunan ini. Pak dhe Pri; terima kasih untuk data, diskusi-diskusinya, dan dukungannya. Ana: Gung makasih dukungannya; materiil maupun non

materiil, maaf selalu merepotkan. Nunung; makasih buat dukungannya dan motornya. Anas dan Lalo; makasih buat dorongan semangatnya dan doanya. Nurul; ulul makasih y buat waktunya uda mau dengerin curhatanku. Laura, Tulet, Indi Tika, Mb Ipe: makasih buat doa dan sarannya. Aya, Asa, Ela, The Sister, Agni, Hesti, Geby, Dewi dan ade2 baruku di PS 17; makasih buat doanya dan suntikan semangatnya. Lukman; makasih buat doanya dan semangatnya. Widhi; ayo wisuda bareng!

9. Semua teman-teman IESP 04, sukses buat kalian semua.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semuanya.

Akhirnya, segala kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan tulisan skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Namun, apabila terdapat kebenaran dalam skripsi ini semata hanya keridhoan Allah SWT Sang Maha Sempurna. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 22 Februari 2011

Maryam Yuliani  
NIM: C2B004176

## DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan .....	9
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik .....	9
2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik .....	14
2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen .....	16
2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Kuznets .....	18
2.1.2 Distribusi Pendapatan .....	20
2.1.2.1 Kurva Lorenz .....	26
2.1.3 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah.....	28
2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Pendapatan (Size Distribution of Income) atau Ketimpangan	

Relatif .....	31
2.1.5 Teori Disparitas Pendapatan / Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan.....	32
2.1.5.1 Teori Distribusi Pendapatan Kaldor .....	47
2.1.5.2 Hipotesis Kuznets “U Terbalik” .....	49
2.1.6 Konsep Koefisien Gini .....	53
2.2 Penelitian Terdahulu .....	54
2.3 Kerangka Pemikiran .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	65
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	67
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	68
3.4 Metode Analisis Data dan Pendekatan Penelitian.....	68
3.4.1 Pendekatan Koefisien Gini .....	68
3.4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.....	71
3.4.3 Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / Pendapatan Perkapita dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....</b>	<b>74</b>
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	74
4.1.1 Kondisi Geografi Jawa Tengah .....	74
4.1.2 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah .....	75
4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota dan Propinsi Jawa Tengah.....	76
4.1.4 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten/ Kota dan Propinsi di Jawa Tengah Menurut Indeks Gini .....	78
4.1.5 Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran .....	80
4.2 Hasil Analisis .....	82
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Pendapatan Perkapita Jawa Tengah dan Distribusi Pendapatan Jawa Tengah .....	82

4.2.2 Hasil Analisis Gini Rasio dan Kurva Lorenz .....	89
4.2.3 Keterkaitan antara Ketimpangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi .....	92
4.2.4 Keterkaitan antara Ketimpangan Pendapatan dengan Pendapatan Perkapita.....	97
4.3 Pembahasan.....	101
4.3.1 Ketimpangan Pendapatan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Rendah .....	101
4.3.2 Ketimpangan Pendapatan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Tinggi.....	107
4.3.3 Pemerataan Pendapatan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Rendah .....	114
4.3.4 Pemerataan Pendapatan dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Tinggi.....	122
BAB V PENUTUP.....	131
5.1 Simpulan.....	131
5.2 Keterbatasan .....	133
5.3 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	60
Tabel 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 serta Perkembangannya di Jawa Tengah Tahun 2004-2008	76
Tabel 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2008 .....	77
Tabel 4.3	Indeks Gini Kabupaten/ Kota dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 .....	79
Tabel 4.4	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2007 .....	102
Tabel 4.5	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	102
Tabel 4.6	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008.....	103
Tabel 4.7	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2007 .....	105
Tabel 4.8	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	105
Tabel 4.9	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	106
Tabel 4.10	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2007 .....	109
Tabel 4.11	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	109
Tabel 4.12	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	110
Tabel 4.13	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2007 .....	112
Tabel 4.14	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008 .....	112

Tabel 4.15	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pendapatan Perkapita Tinggi dan Gini Rasio Tinggi Tahun 2008.....	113
Tabel 4.16	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2007 .....	115
Tabel 4.17	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008 .....	115
Tabel 4.18	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pertumbuhan Ekonomi Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008 .....	116
Tabel 4.19	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2007 .....	120
Tabel 4.20	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008 .....	120
Tabel 4.21	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pendapatan Perkapita Rendah dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008.....	121
Tabel 4.22	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Rendah 2007 .....	123
Tabel 4.23	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Rendah 2008 .....	124
Tabel 4.24	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008.....	124
Tabel 4.25	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Tinggi dan Gini Rasio Rendah Tahun 2007 .....	127
Tabel 4.26	Daerah dengan Pendapatan Perkapita Tinggi dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008 .....	127
Tabel 4.27	Alasan Perpindahan Kuadran Menuju Kuadran dengan PendapatanPerkapita Tinggi dan Gini Rasio Rendah Tahun 2008 ...	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pilihan Produksi Antara Barang Mewah dengan Barang Kebutuhan Pokok (Kerangka Kemungkinan Produksi).....	21
Gambar 2.2	Kurva Lorenz .....	27
Gambar 2.3	Kurva Kuznet "U Terbalik" .....	50
Gambar 2.4	Diagram Tipologi Empat Kuadran antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini dan Kurva Kuznets .....	64
Gambar 3.1	Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kesenjangan Pendapatan.....	72
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2006-2008 .....	78
Gambar 4.2	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah Tahun 2005-2010 .....	80
Gambar 4.3	Grafik Penduduk 15+ yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2007-2008 .....	81
Gambar 4.4	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 .....	83
Gambar 4.5	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 .....	84
Gambar 4.6	Grafik Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah 2007-2008 .....	84
Gambar 4.7	Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 .....	86
Gambar 4.8	Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 .....	86
Gambar 4.9	Grafik Distribusi Pendapatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 .....	88
Gambar 4.10	Grafik Distribusi Pendapatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 .....	88

Gambar 4.11	Grafik Kurva Lorenz Tahun 2007 .....	90
Gambar 4.12	Grafik Kurva Lorenz Tahun 2008 .....	91
Gambar 4.13	Grafik Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2007 .....	92
Gambar 4.14	Sebaran Daerah Berdasarkan Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio, Tahun 2007 .....	94
Gambar 4.15	Grafik Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2008 .....	95
Gambar 4.16	Sebaran Daerah Berdasarkan Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio, Tahun 2008 .....	96
Gambar 4.17	Grafik Keterkaitan Antara Pendapatan Perkapita dengan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2007 .....	97
Gambar 4.18	Sebaran Daerah Berdasarkan Kuadran Pendapatan Perkapita dan Gini Rasio, Tahun 2007.....	98
Gambar 4.19	Grafik Keterkaitan Antara Pendapatan Perkapita dengan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2008.....	99
Gambar 4.20	Sebaran Daerah Berdasarkan Kuadran Pendapatan Perkapita dan Gini Rasio, Tahun 2008.....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Tabel PDRB, Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita Jawa Tengah Tahun 2007-2008.....	138
Lampiran B	Tabel Distribusi Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi ....	139
Lampiran C	Hasil Analisis Indeks Gini Kabupaten/ Kota dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 .....	143
Lampiran D	Hasil Analisis Indeks Gini Kabupaten/ Kota dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 .....	144

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat dan dianalisis, baik secara nasional maupun secara regional (Lincoln Arsyad, 2004).

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatian ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kebijaksanaan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara.

Selain Indonesia, banyak negara lain yang mengalami kesenjangan pendapatan, bahkan dengan tingkat yang lebih buruk. Nancy Birdsall, David Ross dan Richard Sabot (The World Bank Economic Review, September 1995) menunjukkan bahwa negara-negara di Amerika Latin dan Afrika seperti Cile,

Peru, Bolivia, Brasil, Kenya, Gabon, Botswana justru mengalami kesenjangan pendapatan yang jauh lebih parah dari Indonesia. Dalam penelitian tersebut, kesenjangan pendapatan diukur dari rasio; bagian pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk terkaya terhadap bagian pendapatan yang diterima 40 persen penduduk paling miskin. Menurut penelitian tersebut, posisi Indonesia ternyata relatif baik. Hebatnya, tingkat kesenjangan di Indonesia justru lebih rendah dibandingkan beberapa negara Asia Timur maupun Tenggara seperti Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, Thailand, Philipina. Memang, dalam penelitian tersebut tidak dikemukakan tingkat pendapatan perkapita dimasing-masing negara. Akan tetapi kita mengetahui bahwa sebagian negara Asia Timur dan Tenggara yang disebutkan tadi jelas pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari Indonesia.

Data dekade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara sedang berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembanguana ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi (Tambunan, 2001). Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kaum kaya. Studi Ahuja, dkk (1997) mengenai negara-negara di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 1980an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan

meningkat kembali di LDC's dan DC's seperti Indonesia, Thailand, Inggris dan Swedia.

Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. (Mudrajad Kuncoro: 1997).

Evolusi kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut Hipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar negara (cross-section) dan data dari sejumlah survey atau observasi disetiap negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi: pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Islam dan Khan (1986) menunjukkan bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan berkorelasi dengan tingkat pendapatan propinsi-propinsi di Indonesia. Walaupun korelasinya lemah dan terletak pada batas tidak signifikan

secara statistik, pola hubungannya menunjukkan bahwa propinsi-propinsi dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang tinggi pula. Kecenderungan demikian kiranya mendukung tahap awal dari hipotesis dengan pola U-terbalik.

Evaluasi terhadap distribusi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih dari 64 tahun selalu menyisakan problema mendasar tentang disparitas yang tidak pernah terselesaikan, dan hingga sekarang alasan untuk ini belum ditemukan. Sebuah analisis data panel yang dilakukan oleh Resosudarmo, et al. (2006) menegaskan bahwa kesenjangan dalam pendapatan per kapita provinsi di Indonesia relatif parah. Hal ini didasarkan pada fenomena, bahwa meskipun pertumbuhan PDB provinsi bervariasi dari waktu ke waktu, Kalimantan Timur, Riau, dan Jakarta selalu diantara propinsi terkaya dan Aceh telah dianggap sebagai propinsi yang memiliki PDB per kapita yang tinggi sejak awal 1980-an, sedangkan NTT selalu berada diantara yang termiskin.

Alisjahbana (2005) dalam Noegroho dan Soelistianingsih (2007), mengatakan bahwa ketimpangan juga sering terjadi secara nyata antara daerah kabupaten/ kota di dalam wilayah propinsi itu sendiri. Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.

Lebih lanjut Noegroho dan Soelistianingsih (2007) menemukan bahwa masalah ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa saja melainkan juga antar wilayah di dalam Pulau Jawa itu sendiri, sebagaimana yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah.

Walaupun angka indeks gini Propinsi Jawa Tengah masih berada pada indikasi yang relatif rendah, namun perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini nampak nyata sekali pada periode tahun 2003-2007. Pada tahun 2003 ketika tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 4,98%, angka indeks gini Jawa Tengah adalah sebesar 0,2507. Pada tahun 2005 ketika tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,35%, angka indeks gini juga meningkat menjadi 0,2833. Pola ini juga terjadi pada tahun 2007 yaitu ketika tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,59 angka indeks gini sebesar 0,2525.

Berpijak pada data yang tersebut di atas maka penulis berkeinginan mengkaji besarnya tingkat ketimpangan di Propinsi Jawa Tengah dalam penelitian yang berjudul “KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH (TAHUN 2007-2008).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Selama proses awal pembangunan terjadi suatu dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. Kuznets dalam hipotesisnya yang dikenal dengan hipotesis “U- Terbalik”

mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dengan kata lain terjadi ketimpangan yang tinggi dalam didistribusi pendapatan. Namun, pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik. Menurut Kuznets distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Ketimpangan ekonomi regional dalam suatu perekonomian merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Persoalan ketimpangan di Indonesia masih menjadi masalah yang menarik untuk diteliti, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang heterogen. Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia yang berpilar pada pertumbuhan ekonomi membawa implikasi pada terjadinya ketimpangan regional. Bahkan beberapa penelitian tentang ketimpangan di Indonesia menunjukkan fenomena bahwa ketimpangan tersebut tidak semakin turun dari waktu ke waktu (Diana Wijayanti, 2004).

Jawa Tengah merupakan salah satu bagian dari propinsi di Indonesia yang juga menghadapi masalah ketimpangan pendapatan ditengah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonominya. Dari tahun 2003 hingga tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 4,98 pada tahun 2003 mejadi 5,46 pada tahun 2008 (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009). Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah terjadi pula peningkatan nilai indeks gini di Jawa Tengah yaitu sebesar 0,2507 pada tahun 2003 menjadi 0,3033 pada tahun 2008. Dari tahun 2003-2008, nilai indeks gini yang dicapai Jawa Tengah pada tahun 2008

merupakan nilai indeks gini tertinggi (0,3033) (Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Jawa Tengah, 2008).

Terjadinya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan dalam kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah menjadi suatu hal penting yang perlu dikaji yaitu mengenai adanya keterkaitan pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan ketimpangan distribusi pendapatan di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai di atas maka penelitian ini bertujuan untuk melihat pola keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat yang ada di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah

- (1). Memberikan sumbangan informasi yang sistematis mengenai persoalan ekonomi regional terutama tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah.
- (2). Sebagai tambahan dan guna melengkapi khasanah pengetahuan tentang ekonomi pembangunan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengenai permasalahan, perumusan permasalahan dan tujuan penelitian beserta sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan distribusi pendapatan serta keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan. Selain itu juga terdapat kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Menguraikan tentang metode penelitian meliputi definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV Menguraikan hasil dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi objek penelitian yang berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Menguraikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan**

###### **2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan awal abad ke-19, yaitu di masa Revolusi Industri, di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

#### **1. Adam Smith**

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Lincoln Arsyad, 1997:55).

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu:

1. Sumberdaya alam yang tersedia (atau faktor produksi “tanah”)
2. Sumberdaya insani (atau jumlah penduduk)
3. Stok barang modal yang ada

Menurut Adam Smith dalam Suparmoko (1992), untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu di mana akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Di samping itu Smith juga menitikberatkan pada “luas pasar”. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat komulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional dan selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi, spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil

yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

## **2. David Ricardo**

Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mahzab Klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mahzab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817 (Lincoln Arsyad, 1997:58).

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu :

1. Teori tentang nilai dan harga barang.
2. Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
3. Teori tentang perdagangan internasional.
4. Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lincoln Arsyad (1997), garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu :

1. Jumlah tanah terbatas.
2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah berada di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah).
3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
5. Sektor pertanian dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang kita kenal dengan istilah *the law of diminishing returns*. Selama buruh yang diperkerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah. Proses ini akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk (tenaga kerja) menurun. Kemudian tingkat upah akan naik lagi sampai tingkat upah alamiah. Pada posisi ini jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi

adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja, artinya, dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Lincoln Arsyad, 1997:59).

Inti dari proses pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan dinamis, yaitu antara :

- a. *The law of diminishing return*, dan
- b. Kemajuan Teknologi

Proses tarik-menarik tersebut akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return*. Keterbatasan faktor produksi tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber alamnya. Apabila potensi sumber alam ini telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat akan mencapai posisi stasionernya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tingkat output konstan
2. Jumlah penduduk konstan
3. Pendapatan perkapita juga menjadi konstan
4. Tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal)
5. Tingkat keuntungan pada tingkat minimal
6. Akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
7. Tingkat sewa tanah yang maksimal

### **2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik**

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonom klasik. Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan pilar yang sangat mewarnai teori pertumbuhan neoklasik sehingga penggagasnya, Robert Solow, dianugerahi Hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 1987. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitiannya, Solow (1957) mengatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi adalah sangat tinggi (Lincoln Arsyad, 1997:61).

Pendapat kaum Neoklasik tentang perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Suryana, 2000:58) :

- a. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e. Aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan.

Menurut Todaro (2000), teori pertumbuhan Neoklasik menegaskan bahwa kondisi keterbelakangan negara-negara berkembang bersumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumber daya yang selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan adanya campur tangan

pemerintah yang berlebihan. Model pertumbuhan Neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing return*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah, sedangkan jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap (*constant return to scale*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoretisi lainnya diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Model pertumbuhan Neoklasik Solow ini menggunakan fungsi produksi agregat standar, yakni :

$$Y = Ae^{ut} K^\alpha L^{1-\alpha} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dalam persamaan tersebut, Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja non terampil, A adalah suatu konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar, sedangkan  $e^{ut}$  melambangkan konstanta tingkat kemajuan teknologi. Adapun simbol  $\alpha$  melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal itu biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam total pendapatan nasional suatu negara. Karena  $\alpha$  diasumsikan kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan produk marjinalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan Neoklasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (*diminishing returns*).

Menurut model pertumbuhan ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi. Lebih lanjut dikemukakan bahwa perekonomian tertutup (*closed economy*), yakni yang tidak menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar, yang tingkat tabungannya rendah, maka *ceteris paribus* perekonomian itu dalam jangka pendek pasti mengalami laju pertumbuhan lebih lambat apabila dibandingkan dengan perekonomian lainnya yang memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi. Pada akhirnya hal ini akan mengakibatkan konvergensi penurunan pendapatan per kapita. Di lain pihak, perekonomian terbuka (*open economy*), yakni yang mengadakan hubungan perdagangan, dan sebagainya dengan negara atau pihak-pihak luar pasti akan mengalami suatu konvergensi peningkatan pendapatan per kapita, karena arus permodalan akan mengalir deras dari negara-negara kaya ke negara-negara miskin dimana rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah sehingga menjanjikan imbalan atau tingkat keuntungan investasi yang lebih tinggi (Todaro, 2000:117).

### **2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth*)**

Menurut Todaro (2000), teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) atau secara lebih sederhana disebut dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Teori ini

menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya ekulibrium jangka panjang.

Model pertumbuhan endogen menolak asumsi penyusutan imbalan marjinal atas investasi modal (*diminishing marginal returns to capital investment*) dan menyatakan bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil, model pertumbuhan endogen ini mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang (Todaro, 2000:121).

Todaro (2000) mengemukakan persamaan sederhana yang dapat ditarik dari teori pertumbuhan endogen yakni :

$$Y = AK \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

Dalam rumusan ini, A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Rumusan tersebut menekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan modal manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang melampaui keuntungan pihak swasta yang melakukan investasi itu, dan kelebihanannya cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil. Pada saat selanjutnya, hal tersebut akan menciptakan peluang-peluang investasi baru sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan skala hasil yang

mampu menciptakan proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustained development*) dalam jangka panjang.

Melalui model pertumbuhan endogen dapat diketahui bahwa potensi keuntungan investasi yang tinggi di negara-negara berkembang yang rasio modal-tenaga kerjanya masih rendah, ternyata terkikis oleh rendahnya tingkat investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumber daya manusia (terutama melalui pengembangan fasilitas dan lembaga pendidikan), sarana-sarana infrastruktur, serta aneka kegiatan penelitian dan pengembangan.

Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi di mana sumber daya manusia diakumulasikan selanjutnya. Model pertumbuhan endogen melihat perubahan teknologi sebagai hasil endogen dari investasi dalam sumber daya manusia dan industri-industri padat teknologi, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Dengan demikian, model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian nasional demi mempromosikan pembangunan ekonomi melalui investasi langsung dan tidak langsung dalam pembentukan modal manusia dan mendorong investasi swasta asing dalam industri padat teknologi (Todaro, 2000:122-123).

#### **2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Kuznets**

Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets, yang dikenalkan oleh Profesor Simon Kuznets, pemenang hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1971,

yang dijelaskan oleh Lincoln Arsyad (1997) harus dibedakan dari teori pertumbuhan ekonomi lainnya oleh karena adanya kekhasan dari teori ini dibandingkan lainnya. Kuznets dengan kepeloporannya dalam mengukur dan menganalisis sejarah pertumbuhan pendapatan nasional negara-negara maju, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; kemampuan pertumbuhan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.” Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya:

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasi potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi tanpa input yang melingkapi tidak akan berarti apa-apa.

Dalam analisisnya yang mendalam, Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu (Lincoln Arsyad, 1997:222) :

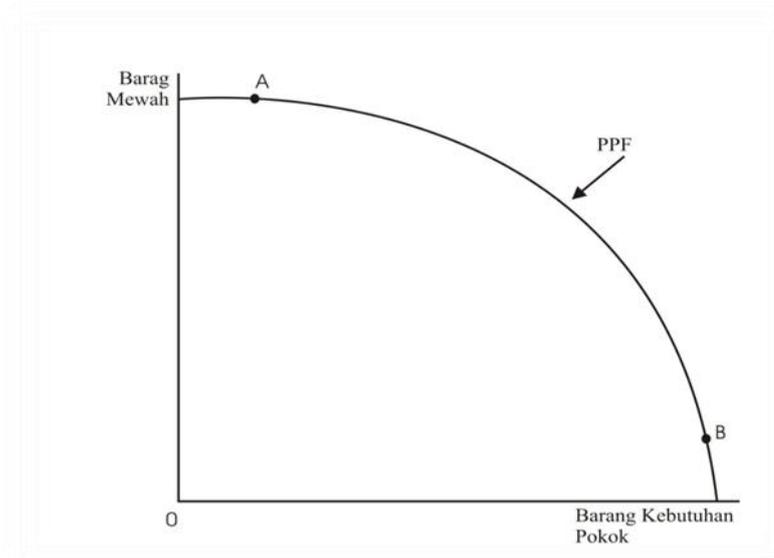
- Dua Variabel Ekonomi Agregatif
  1. Tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk.

2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja.
- Dua Variabel Transformasi Struktural
    3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
    4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.
  - Dua Faktor yang Mempengaruhi Meluasnya Pertumbuhan Ekonomi Internasional
    5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar.
    6. Pertumbuhan ekonomi hanya terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia.

### **2.1.2 Distribusi Pendapatan**

Pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi atau Production Possibility Frame Work (Arsyad,1997: 224). Untuk menggambarkan analisis tersebut produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi dua macam barang. Pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok (*necessity goods*) seperti makanan pokok, pakaian, perumahan sederhana, dan sebagainya. Kedua, adalah barang-barang mewah seperti mobil mewah, video, televisi, pakaian mewah, dsb. Dengan menganggap bahwa produksi sekarang terjadi pada batas kemungkinan produksi (dimana semua sumber daya digunakan secara penuh dan efisien). Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana menentukan kombinasi antara barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang mewah tersebut? Dan siapa yang akan menentukan? Gambar 2.1 berikut akan menjelaskan masalah tersebut.

**Gambar 2.1**  
**Pilihan Produksi Antara Barang Mewah dengan Barang Kebutuhan Pokok**  
**(Kerangka Kemungkinan Produksi)**



Sumber: Lincolin Arsyad, 1997, hal: 226

Pada sumbu vertikal digambarkan semua barang mewah secara keseluruhan, sedangkan sumbu horizontal melukiskan kelompok barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu *Production Possibility Curve* (PPC) tersebut menggambarkan kombinasi maksimal dari kedua macam barang tersebut yang bisa dihasilkan perekonomian itu dengan cara menggunakan teknologi tertentu. Namun keadaan tersebut tidak menunjukkan secara jelas kombinasi yang mana di antara banyak kemungkinan akan dipilih.

Sebagai contoh seperti yang dijelaskan oleh Lincolin Arsyad (1997), GNP riil yang sama ditunjukkan pada titik A dan titik B pada gambar di atas. Pada titik A banyak barang mewah dan sedikit barang kebutuhan pokok yang dihasilkan, sedangkan pada titik B sebaliknya. Bagi negara-negara yang berpendapatan rendah, kombinasi yang diharapkan adalah pada titik B. Tetapi faktor penentu utama bagi kombinasi output dalam perekonomian pasar dan campuran adalah

tingkat permintaan efektif konsumen secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh posisi dan bentuk kurva permintaan masyarakat secara keseluruhan terutama sekali ditentukan oleh tingkat distribusi pendapatan nasional.

Di negara yang tingkat GNP dan pendapatan per kapita nya rendah, semakin timpang distribusi pendapatan maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu posisi produksi konsumsi adalah pada titik A dimana orang kaya, biasanya, proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Pada akhirnya keadaan ini tentu akan menyebabkan kelompok miskin semakin menderita (Lincoln Arsyad, 1997: 226).

Todaro (2000) menyebutkan bahwa distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analitis maupun untuk tujuan mengumpulkan data kuantitatif, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan “perorangan” atau “ ukuran”.

Distribusi ukuran adalah mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berdasarkan pangsa pendapatan yang diterima. Distribusi ukuran juga biasa disebut dengan ukuran distribusi pendapatan perorangan (personal distribution) di mana ukuran ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Bagaimana caranya pendapatan itu diperoleh oleh masing-masing individu tidak diperhatikan. Apa yang diperhatikan disini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli

dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba, usaha, utang, hadiah, ataupun warisan. Lebih jauh lagi, sumber-sumber yang bersifat okasional (perkotaan atau pedesaan) atau okupasional (misalnya pertanian, industri, pengolahan, perdagangan, dan jasa-jasa) juga tidak diperhatikan. Bila si X dan si Y masing-masing menerima pendapatan yang sama per tahunnya, maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan bahwa si X memperoleh uangnya dari membanting tulang selama 15 jam sehari, sedangkan si Y hanya onggang-onggang kaki, menunggu bunga harta warisan yang didepositokannya.

Oleh karena itu, untuk mengukur distribusi pendapatan perorangan ini para ekonom, dan ahli statistik cenderung mengelompokkan masing-masing individu tersebut semata-mata berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran yang hanya atas dasar besaran nominal. Biasanya, populasi dibagi menjadi lima kelompok, disebut kuintil (quintiles), atau sepuluh kelompok disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya, mereka akan menghitung berapa (persen) dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan ( Todaro, 2000: 180).

## 2. Distribusi Pendapatan “Fungsional”

Distribusi fungsional menunjukkan pangsa pendapatan nasional dari faktor-faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan fungsional adalah persentase dari penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha yang terpisah secara individual, dan membandingkan dengan persentase total pendapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan keuntungannya (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, uang simpanan, modal fisik).

Menurut Ahluwalia (1997) dalam Pramono (1999) dalam “Income Inequality: Some Dimension Of The Problem”, terkait dengan keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 hal, yaitu:

### a. Distribusi Pendapatan Relatif

Perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia menggolongkan penduduk penerima pendapatan sebagai berikut:

1. 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah
2. 40% penduduk menerima pendapatan sedang
3. 20% penduduk menerima pendapatan paling tinggi.

### b. Distribusi Pendapatan Mutlak

Persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan

tertinggi bila 40% penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17% pendapatan nasional. Dan ketidakmerataan rendah bila 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari seluruh pendapatan nasional.

Di Negara Sedang Berkembang, yang menjadi perhatian utama adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dimana masih banyak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan walaupun pertumbuhannya tinggi. Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (1973) dalam Lincolin Arsyad (1997), terdapat delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
2. Adanya inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah

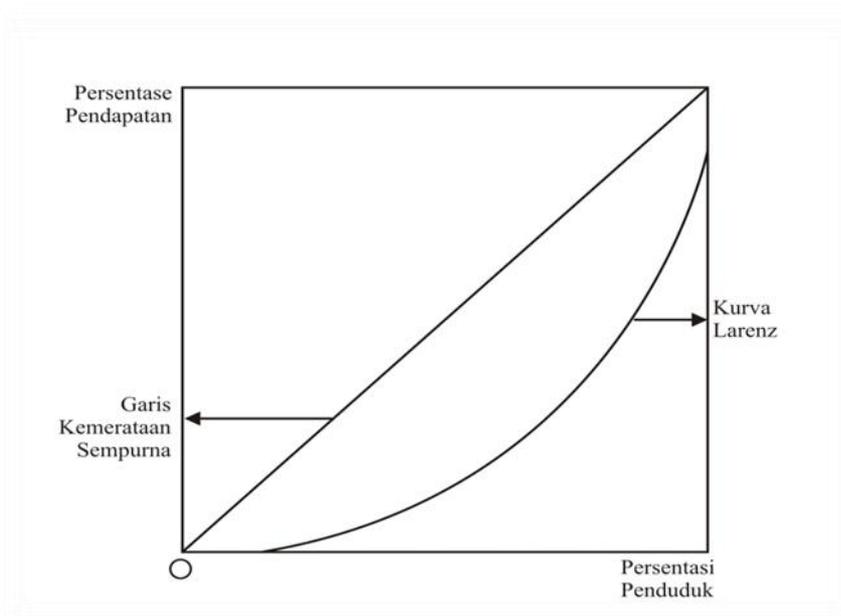
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industry substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dll.

Untuk mengukur ketinggian distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva lorens atau menggunakan koefisien gini.

#### **2.1.2.1 Kurva Lorenz**

Merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Dinamakan kurva Lorenz karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorens, seorang ahli statistika Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka. Kurva ini menggambarkan hubungan antara prosentase jumlah penduduk dengan prosentase pendapatan yang diterima. Berikut ini adalah gabungan kurva Lorenz (Lincoln Arsyad, 1997 : 229).

**Gambar 2.2**  
**Kurva Lorenz**



Sumber: Lincoln Arsyad, 1997, hal 230

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, jumlah penerimaan pendapatan dinyatakan pada sumbu horisontal, tidak dalam angka yang mutlak tapi dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk tersebut. Garis diagonal merupakan garis “kemerataan sempurna” dalam distribusi ukuran pendapatan persentase yang sama dari total pendapatan. Kurva Lorenz ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama misalnya satu tahun.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna misalnya keadaan dimana

seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horisontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak disebelah kanan kurva diagonal. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah (Lincoln Arsyad, 1997: 230).

### **2.1.3 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antarwilayah**

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro, 2004).

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.

Myrdal (1957) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Tambunan (2001) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah antara lain :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
2. Alokasi investasi. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
3. Tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
4. Perbedaan sumberdaya alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya

alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam.

5. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.
6. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidاكلancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada kesenjangan antarwilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antarwilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam penelitian ini untuk menghitung disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah di gunakan indeks ketimpangan Williamson.

Selain dengan indeks Williamson ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi, Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi/diurai menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam wilayah (*Within*) dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional (*Between*). Dengan menggunakan alat analisis indeks

entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan antar kabupaten/kota yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah (Ying, 2000:60) dikutip dalam Sutarno.

#### **2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Golongan Pendapatan (Size Distribution of Income) atau Ketimpangan Relatif**

Menurut Chenery (1975), setiap perubahan distribusi pendapatan dalam proses pembangunan dapat diperhatikan pada:

1. Perubahan pendapatan nasional yang diterima oleh 40 persen dari keseluruhan penduduk yang tergolong sebagai penerima pendapatan terendah.
2. Perubahan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh 20 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang pendapatannya tergolong sebagai pendapatan yang paling tinggi.

Angka-angka yang diperoleh dalam analisa menunjukkan bahwa 20 persen masyarakat yang tergolong dalam penerima pendapatan paling tinggi akan menerima bagian pendapatan nasional yang semakin bertambah banyak pada tahap-tahap awal proses pembangunan dan baru mengalami penurunan atas bagian dari pendapatan nasional yang mereka peroleh di dalam tahap-tahap akhir proses pembangunan. Bagian pendapatan nasional yang mereka peroleh pada waktu pendapatan perkapita sebesar US \$ 100 terus meningkat sampai pada waktu pendapatan perkapita mencapai sekitar US \$ 400, kemudian akan menurun lagi ketika pendapatan perkapita meningkat sampai US \$ 1000 (Chennery, 1975).

Corak distribusi pendapatan yang diperoleh dalam analisa Chennery ini sesuai dengan hasil penelitian Ahluwalia (1974) yang memberikan gambaran

mengenai distribusi pendapatan relative dan distribusi pendapatan mutlak dalam proses pembangunan.

Dalam menggambarkan distribusi pendapatan relative di beberapa Negara, Ahluwalia menggolongkan penerimaan pendapatan dalam tiga golongan pendapatan yaitu 40% penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Pembagian tiga golongan ini sesuai dengan patokan ukuran World bank (Ahluwalia, 1974), yang mengklasifikasikan tiga jenis ketimpangan distribusi pendapatan, yakni masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan distribusi pendapatan tinggi (high inequality) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan sedang (moderat inequality) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12% sampai 17% dari pendapatan nasional.
3. Ketimpangan distribusi pendapatan rendah (low inequality) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari pendapatan nasional.

### **2.1.5 Teori Disparitas Pendapatan / Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan**

Sasaran pemerataan dan keadilan memerlukan syarat lain yang sulit dipenuhi tetapi tidak dapat ditawar yaitu partisipasi dari semua kelompok ekonomi khususnya ekonomi rakyat lemah. Pemerataan dan keadilan sulit

menjangkau kelompok ekonomi lemah karena mempunyai sarana minimal terutama modal dan teknologi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang sangat kompetitif (Mubyarto, 1995).

Menurut Williamson (1995), pada umumnya ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung membesar pada saat terjadinya proses pembangunan yang disebabkan karena factor-faktor yaitu:

1. Migrasi penduduk usia produktif ke negara maju
2. Investasi lebih menguntungkan di daerah maju
3. Tidak adanya keterkaitan antara “*regional markets*” yang menyebabkan adanya rintangan dalam bekerjanya *spread effect*, inovasi dan *multiplier* pendapatan
4. Kebijakan pembangunan cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya modal di daerah maju
5. Pada daerah maju, *polarization effect* bekerja jauh lebih kuat daripada *trickling down effect* yang seharusnya lebih menguntungkan bagi daerah miskin.

Mubyarto (1995) menyebutkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun dengan cepat, namun belum ada tanda-tanda berkurangnya ketimpangan dalam pembagian pendapatan nasional. Juga ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antar sektor industri dan sektor pertanian bertambah serius. Menurut Mubyarto, ketimpangan dapat dibedakan menjadi:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian

2. Ketimpangan antar daerah seperti ketimpangan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal-kapitalistik, perekonomian yang tumbuh terlalu cepat (*too rapid growth*) justru mengakibatkan ketimpangan menjadi semakin parah dan sulit diatasi.

Menurut Roger Leroy Miller dan Roger E. Mainers (1997), ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Usia. Pekerja muda biasanya masih terbatas keterampilan dan pengalamannya. Produk fisik marginal mereka lebih rendah daripada rata-rata produk fisik marginal yang dihasilkan oleh para pekerja yang lebih berumur dan berpengalaman.
2. Karakteristik bawaan. Besarnya pendapatan kalangan pekerja tertentu besarnya sangat ditentukan oleh karakteristik bawaan mereka. Sejauh mana besar kecilnya pendapatan dihubungkan dengan karakteristik bawaan masih diperdebatkan, apalagi keberhasilan seseorang seringkali dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan masyarakat.
3. Keberanian mengambil resiko. Mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang berbahaya biasanya memperoleh pendapatan yang lebih banyak. *Ceteris Paribus*, siapapun yang berani mempertaruhkan nyawanya di bidang kerja akan mendapatkan imbalan yang lebih besar.

4. Ketidakpastian dan variasi pendapatan. Bidang-bidang kerja yang hasilnya serba tidak pasti, misalnya bidang kerja pemasaran, mengandung resiko yang lebih besar. Mereka yang menekuni bidang itu dan berhasil, akan menuntut dan menerima pendapatan yang lebih besar, melebihi mereka yang bekerja di bidang-bidang yang lebih aman.
5. Bobot latihan. Bila karakteristik bawaan dianggap sama atau diabaikan, maka mereka yang mempunyai bobot latihan yang lebih tinggi pasti akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak.
6. Kekayaan warisan. Mereka yang mempunyai kekayaan warisan atau lahir di lingkungan keluarga kaya akan lebih mampu memperoleh pendapatan dari pada mereka yang tidak memiliki kekayaan warisan, sekalipun kemampuan dan pendidikan mereka setara.
7. Ketidaksempurnaan pasar. Monopoli, monopsoni, kebijakan sepihak serikat buruh, penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah, ketentuan syarat-syarat lisensi, sertifikat dan sebagainya, semuanya turut melibatkan perbedaan-perbedaan pendapatan dikalangan kelas-kelas pekerja.
8. Diskriminasi. Di pasar tenaga kerja sering terjadi diskriminasi ras, agama, atau jenis kelamin dan itu semua merupakan penyebab variasi tingkat pendapatan.

Irma Adelman dan Cynthia Morris tahun 1973 (Lincoln Arsyad, 1997) mengemukakan 8 sebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang sebagai berikut:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive). Persentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara-negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa campur tangan pemerintah untuk tiap-tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antardaerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah. Jika pembangunan ekonomi daerah diserahkan pada

mekanisme kekuatan pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan (Lincoln Arsyad, 1997).

Tulus T.H. Tambunan (2001) mengemukakan beberapa faktor-faktor penyebab ketimpangan antara lain:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi wilayah ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah.

2. Alokasi investasi

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

3. Tingkat mobilitas dan faktor produksi yang rendah antardaerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan kapital merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional.

4. Perbedaan sumber daya alam antardaerah

Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin sumber daya alam.

5. Perbedaan kondisi demografis antarwilayah

Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.

6. Kurang lancarnya perdagangan

Kurang lancarnya perdagangan antardaerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Ketidاكلancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.

Secara umum, kebijaksanaan regional biasanya mengandung komponen pertumbuhan dan komponen pemerataan yang berkaitan dengan pendorongan pertumbuhan dan efisiensi dalam perekonomian nasional dan berkenaan dengan pengecilan perbedaan-perbedaan yang menyolok dalam indeks kesejahteraan antarwilayah. Tetapi ada kemungkinan kedua hal ini saling bertentangan satu sama lain, karena memaksimalkan pendapatan riil nasional per kapita mungkin tidak berperan ke arah penyamaan perbedaan-perbedaan pendapatan regional.

Pertentangan tujuan merupakan hal yang umum. Yang menyebabkan tidak imbangnya proses pertumbuhan regional adalah: keuntungan-keuntungan aglomerasi, indivisibilitas investasi, perbedaan kekayaan sumber daya alam dan ketidakmerataan distribusi spasial dari penduduk dan permintaan pasar. Pengejaran pertumbuhan dan efisiensi cenderung untuk menimbulkan persoalan apabila tujuan pemerataan adalah penting (H.W Richarson, 1977).

Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan ekonomi menurut Field tahun 1990 (Mudrajad Kuncoro, 1997), tergantung dari jenis data yang digunakan apakah *cross section*, *time series*, atau menggunakan data mikro, masing-masing menghasilkan perhitungan yang berbeda karena pendekatan yang berbeda.

Dalam Michael Todaro (2000) terdapat perdebatan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

a. Argumen tradisional :

Sebagian besar teori nampaknya mengisyaratkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Argumen dasar yang sering dilontarkan dalam rangka menciptakan kesan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi sementara yang tidak terelakkan adalah bahwa akumulasi pendapatan perorangan dan perusahaan setinggi mungkin memang harus diciptakan demi membentuk formasi modal yang kuat guna merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Seandainya ketimpangan terus dibiarkan, sehingga hanya orang-

orang kaya yang menabung serta menginvestasi sejumlah besar pendapatannya, sementara itu, si miskin harus membelanjakan pendapatannya untuk memperoleh barang-barang konsumsi, dan apabila laju pertumbuhan GNP memang langsung berkaitan dengan proporsi pendapatan nasional yang ditabung, maka perekonomian yang bersangkutan dengan sendirinya akan ditandai oleh suatu distribusi pendapatan yang sangat merata. Hal ini memang memungkinkan terakumulasinya tingkat tabungan dan investasi yang lebih besar sehingga akan menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada laju pertumbuhan yang dialami oleh perekonomian yang distribusi pendapatannya lebih merata. Hal ini juga diharapkan akan berlangsung terus menerus sampai pada akhirnya menciptakan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang cukup tinggi sehingga dapat didistribusikan kembali pada masyarakat melalui program-program perpajakan dan subsidi. Akan tetapi waktu distribusi pendapatan itu tiba, maka setiap usaha pendistribusian kembali pendapatan tersebut akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi secara tajam. Karena perlambatan itu dianggap negatif, maka saat pendistribusian itu terpaksa ditunda. Padahal kapanpun hal itu dilaksanakan, dampaknya terhadap laju pertumbuhan akan sama saja. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi akan terus melaju, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan takkan kunjung membaik.

b. Argumen tandingan :

Terdapat lima alasan yang umum mengapa banyak ekonom pembangunan merasa bahwa argumen diatas tidak benar, dan bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa dinomorduakan, karena hal itu merupakan kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin, yang terwujud berupa kondisi kesehatan yanga buruk, kurang makan dan gizi serta pendidikannya yang renadah, justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka, dan pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Di pihak lain, strategi yang lebih mementingkan pemerataan penghasilan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas yang pada gilirannnya akan meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian nasional secara keseluruhan.

Ketiga, strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan pemerataan pendapatan sebenarnya tidak lebih dari ekspresi sikap-sikap oportunis dan serakah dari

golongan-golongan tertentu yang ingin menciptakan dan mempertahankan kondisi ekonomi politik yang sedemikian rupa demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Menurut aliran ini, strategi yang timpang semacam ini lebih tepat disebut sebagai strategi yang “anti pembangunan” (*antidevelopment strategy*).

Keempat, upaya-upaya menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang peningkatan permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri, seperti bahan makanan dan pakaian. Sementara itu, golongan kaya, cenderung membelanjakan tambahan penghasilan mereka pada barang-barang impor yang serba mewah. Jadi apabila kalangan yang menjadi tujuan adalah peningkatan tabungan dan investasi domestik, maka yang harus diperhatikan bukannya golongan elite tetapi kalangan masyarakat kebanyakan. Dengan demikian akan tercipta kenaikan permintaan terhadap barang-barang lokal, penciptaan lapangan pekerjaan, dan naiknya persediaan modal serta tingkat investasi di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dengan sendirinya akan menciptakan kondisi yang sangat dibutuhkan bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peran serta yang lebih merata dalam pertumbuhan tersebut.

Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil, melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Yang lebih parah lagi, masyarakat bisa frustrasi dan akan

menunjukkan sikap antipati terhadap “kemajuan” dan upaya-upaya pembangunan pada umumnya, dan ini merupakan sebuah bom politik berbahaya yang siap meledak setiap saat apalagi jika banyak diantara mereka yang cukup berpendidikan sehingga mereka tahu telah diperlakukan tidak adil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan yang saling bertentangan, sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.

Myrdal (ML Jhingan, 1993) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar sedangkan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional diantara negara-negara terbelakang.

Ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar, hal ini menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Jika segala sesuatunya

diserahkan pada kekuatan pasar tanpa diiringi oleh intervensi kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdagangan, perbankan dan hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatu perekonomian sedang berkembang yang cenderung mendatangkan keuntungan akan mengelompok di daerah atau wilayah-wilayah tertentu dan meninggalkan daerah-daerah yang semakin terbelakang.

Myrdal (ML Jhingan, 1993) menyatakan korelasi antara ketimpangan regional dengan pertumbuhan di suatu negara yaitu:

1. Ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara kaya.
2. Di negara miskin ketimpangan regional semakin melebar sedang di negara kaya semakin menyempit.

Kedua korelasi ini dikarenakan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dampak sebar yang akan terjadi karena pembangunan tersebut dibarengi dengan transportasi, komunikasi yang semakin baik serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi yang semuanya cenderung memperkuat daya sebar sentrifugal pengembangan ekonomi tersebut atau cenderung memperlunak hambatan-hambatan yang merintanginya.

Dengan demikian apabila suatu negara berhasil mencapai pembangunan yang tinggi, pembangunan ekonomi akan menjadi suatu proses yang akan berjalan otomatis. Sebaliknya, sebab terbelakangnya negara terbelakang terletak pada lemahnya dampak sebar dan kuatnya dampak balik.

Berikut ini hal-hal yang menyebabkan ketimpangan regional di negara terbelakang:

1. Dampak balik perpindahan modal
2. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi. Apabila sistem perbankan tidak diatur untuk bertindak maka cenderung menjadi alat penyedot tabungan dari wilayah yang miskin ke wilayah yang lebih kaya.
3. Dampak balik migrasi
4. Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang-orang muda dan aktif. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang dan akan menekan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal buruh tersebut.
5. Perdagangan
6. Perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju, sehingga akan menyebabkan ketimpangan regional.
7. Peranan pemerintah
8. Kebijakan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Peranan bebas kekuatan pasar dan kebijakan liberal merupakan dua kekuatan yang menciptakan ketimpangan regional sebagai akibat lemahnya dampak sebar.
9. Lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter dan struktur kekuasaan yang membantu si kaya mengisap si miskin.

Myrdal (ML Jhingan, 1993) berpendapat bahwa tingkat pembangunan yang lebih tinggi akan semakin memperkuat dampak sebar dan cenderung menghambat arus ketimpangan regional ini akan menopang pembangunan ekonomi dan dalam waktu bersamaan menciptakan lebih banyak lagi kondisi yang menguntungkan bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan regional lebih lanjut.

Menurut Myrdal (Sadono Sukirno, 1985) pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menciptakan beberapa keadaan yang akan menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk berkembang. Keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkan sebagai *backwash effect*. Faktor yang dapat menimbulkan *backwash effect* antara lain: pertama, corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah lebih maju. Kedua, corak pengaliran modal yang terjadi karena kurangnya permintaan modal di daerah miskin dan modal lebih terjamin dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang lebih maju. Dan yang ketiga, pola dan kegiatan perdagangan di dominasi industri-industri di daerah yang lebih maju.

Disamping itu perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju dapat menimbulkan keadaan-keadaan yang akan mendorong perkembangan daerah-daerah yang lebih miskin. Dalam hal ini dikatakan adanya *spread effect*, berbentuk pertambahan permintaan dari daerah yang lebih kaya terhadap produksi daerah yang lebih miskin. *Spread effect* ini jauh lebih lemah daripada *backwash effect*. Dalam jangka panjang keadaan ini menyebabkan jurang tingkat

kesejahteraan di antara daerah yang lebih kaya dan daerah yang lebih miskin menjadi bertambah.

### 2.1.5.1 Teori Distribusi Pendapatan Kaldor

Menurut Kaldor ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *propensity to save* ( $s$ ) yang berbeda :  $sp$  untuk kelompok kapitalis dan  $sw$  untuk kelompok buruh, dan kita anggap bahwa  $sp > sw$  (sebenarnya penentuan kelompok ini tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh seperti yang dilakukan oleh Kaldor, tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri sosioekonomis yang lain, misal : kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sector pertanian dan sebagainya). Yang penting adalah kedua kelompok tersebut mempunyai *propensity to save* yang berbeda.

Seluruh pendapatan nasional ( $Q$ ) oleh ke dua kelompok tersebut pembagiannya

$$P + W = Q$$

Dimana :  $P$  = keuntungan atau penghasilan dari kelompok kapitalis

$W$  = upah atau penghasilan dari kelompok buruh

Tabungan masyarakat total biasa dinyatakan sebagai :

$$S = sp P + sw W$$

Pesamaan tersebut kalau dibagi dengan  $Q$ , dan dengan mengingat bahwa

$$W = Q - P$$

Maka :

$$\frac{s}{Q} = sp \frac{P}{Q} + sw \frac{Q-P}{Q}$$

Atau

$$S = (sp - sw) \frac{P}{Q} + sw$$

$P/Q$  menunjukkan berapa bagian dari pendapatan masyarakat (pendapatan nasional) yang diterima oleh kelompok kapitalis, yang sering disebut *profit share*. Jadi dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa *propensity to save* masyarakat secara keseluruhan ( $s$ ) adalah kombinasi dari *propensity to save* dari masing-masing kelompok ( $sp, sw$ ) dan *profit share* (yang menunjukkan pola distribusi pendapatan antar kedua kelompok tersebut). Syarat bagi *warranted of growth* adalah :

$$Sh = [(sp - sw) \frac{P}{Q} + sw h]$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun  $h, sp$  dan  $sw$  adalah koefisien yang mempunyai nilai konstan, namun *warranted of growth* tidak hanya mempunyai satu nilai tapi berkisar antara  $x\%$  dan  $y\%$ . Nilai dimana dalam batas-batas ini yang nantinya merupakan *warranted of growth* tergantung pada pola distribusi pendapatan yang berlaku, yang ditunjukkan oleh *profit share* ( $P/Q$ ). *Warranted of Growth* biasa berkisar antara  $sw h$  (apabila  $P/Q = 0$ ) dan  $sp h$  (apabila  $P/Q = 1$ ).

Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila  $sp > sw$ , maka semakin besar profit share semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin

tidak merata pula distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Model kaldor menunjukkan akan adanya “*Trade off*” atau pilihan antara pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang, atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

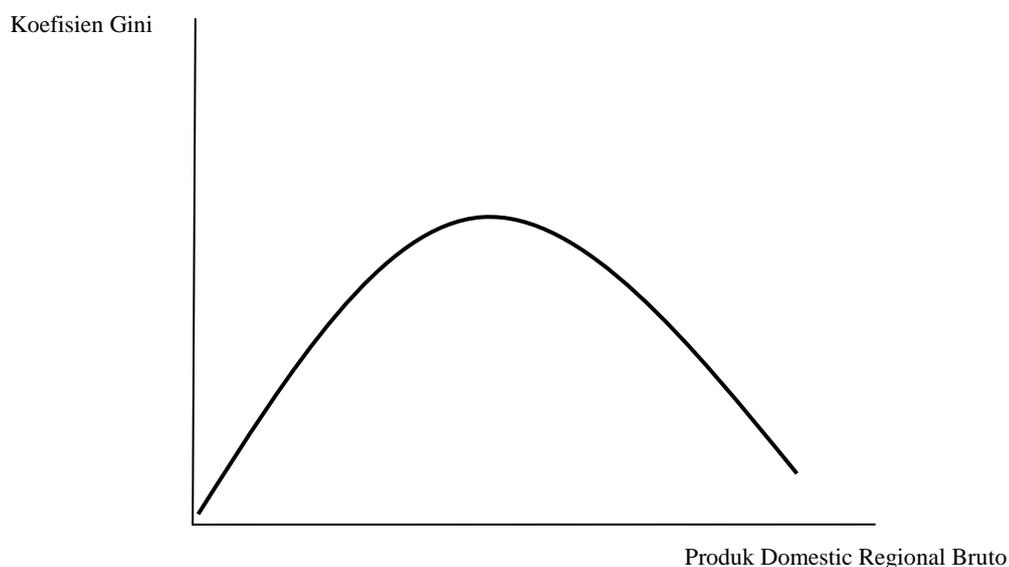
#### **2.1.5.2 Hipotesis Kuznet “U Terbalik”**

Dalam dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Indonesia, menemukan seakan-akan ada suatu korelasi yang positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi yaitu: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan kaum miskin dan kaum kaya (Tulus T.H Tambunan 2001).

Prof. Kuznet (Michael Todaro, 2000), pelopor analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, telah menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita. Kuznets mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik. Konsep ini dikenal dengan konsep Kuznet “U Terbalik”. Hal tersebut biasanya dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sektor modern. Pada tahap ini, lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi.

Kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan ataupun konstan. Selain itu, pada tahap ini, langkah-langkah transfer pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mengurangi kemiskinan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah sehubungan dengan begitu rendahnya tingkat penghasilan yang rendah (Michael Todaro, 2000).

**Gambar 2.3**  
**Kurva Kuznet “U Terbalik”**



Sumber: Michael Todaro, 2000

Hipotesis Kuznet “U Terbalik” dapat memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan (indeks gini) dengan pertumbuhan PDRB. Hipotesis Kuznet menyatakan bahwa pada masa awal-awal pertumbuhan ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap pertumbuhan berikutnya ketimpangan menurun, namun

pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan pada akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut berulang kembali.

Kritik utama terhadap kurva Kuznet ini adalah hasilnya akan sangat sensitif terhadap ukuran ketimpangan dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali. Ada teori yang mengatakan bahwa terdapat *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Diskusi mengenai ada tidaknya *trade off* antara pertumbuhan dengan pemerataan, menurut Fields (1990), tergantung jenis data yang digunakan apakah *cross section*, runtut waktu (*time series*), ataukah menggunakan data mikro (Mudrajad Kuncoro, 1997:135).

Studi dengan data *cross section* paling populer digunakan Simon Kuznets (1955) diakui sebagai pelopor studi komparatif dalam distribusi pendapatan. Ini bisa dilihat dari studi yang dilakukan oleh Kravis (1970), Oshima (1962), Kuznets (1963), Adelman dan Morris (1973), Chenery dan Syrquin (1975), Ahluwalia, Charter, dan Chenery (1979). Studi-studi empiris tersebut agaknya mendukung hipotesis Kuznets tentang kurva U yang terbalik. Yang menarik adalah adanya bukti bahwa hampir separo variasi distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh tingkat pendapatan nasional.

Studi empiris pertama yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) dilakukan oleh Weisskoff (1970), yang mengamati perubahan dan pola distribusi pendapatan di 3 negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Meksiko, dan Puerto Rico. Studi yang dilakukan oleh Fishlow (1972) menunjukkan ternyata sukses ekonomi makro di Brazil tidak diikuti dengan membaiknya distribusi pendapatan.

Studi yang kompresif dilakukan oleh Fields (1980) dengan menggunakan data runtut waktu untuk beberapa negara Asia Timur dan Amerika Latin menemukan fakta yang menarik berikut ini: Pertama, negara yang mengalami kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan ternyata kurang lebih sama dengan banyaknya negara yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan. Kedua, kemiskinan absolut menurun di kebanyakan negara. Ketiga, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan banyak yang berjalan beriringan (Mudrajad Kuncoro, 1997: 136).

Studi lain yang menggunakan data runtut waktu seperti yang dijelaskan dalam Todaro (2000) memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan koefisien gini nampaknya tidak berhubungan sama sekali dengan laju pertumbuhan ekonomi. Studi ini menggunakan data jangka panjang mencakup periode tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1990-an untuk beberapa negara di Asia Timur, Afrika, dan Amerika Latin.

Selanjutnya, studi dengan data mikro pertama kali digunakan pada akhir tahun 1960-an dengan sampel rumah tangga di banyak NSB. Pertanyaan yang selalu muncul adalah: seberapa jauh data mikro dapat dipercaya kebenarannya di NSB? Data mikro mengenai pendapatan absolut mampu menyajikan profil penduduk miskin dengan berbagai karakteristik. Ternyata tingkat kemiskinan yang tinggi ditemukan di kalangan penduduk yang rendah tingkat pendidikannya, tinggal di pedesaan, para pekerja di sektor pertanian, dan sebagainya. Manfaat data mikro selain menjabarkan ketimpangan distribusi pendapatan juga menampilkan potret ketimpangan menurut daerah, industri, ras, maupun jenis kelamin (Mudrajad Kuncoro, 1997: 136-137).

### 2.1.6. Konsep Indeks Gini

Secara konseptual, pendekatan analisis distribusi pendapatan memenuhi 5 kriteria sebagai pendekatan analisis distribusi pendapatan yang baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya 5 hal pokok syarat analisis distribusi telah terpenuhi (BPS, 2009), dimana:

1. Koefisien gini tidak tergantung pada nilai rata-rata. Setiap perubahan secara proporsional antar golongan pendapatan tidak berpengaruh pada distribusi pendapatan, mengingat sebagai acuan analisisnya adalah kelompok pendapatan.
2. Koefisien gini tidak tergantung pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk sebagai obyek analisis namun tidak mempengaruhi nilai koefisien gini, kelompok pendapatan merupakan acuan dasar analisisnya.
3. Koefisien gini bersifat simetris. Perubahan lokasi obyek analisis tidak serta merta merubah koefisien gini pendapatan secara agregat, namun hal tersebut dapat merubah koefisien gini pada golongan pendapatan tertentu dan di wilayah tertentu jika perubahan lokasi obyek analisis cukup besar.
4. Koefisien gini dapat didekomposisi. Pengelompokan obyek analisis berdasarkan latar belakang atau dimensi tertentu dapat dilakukan, misalnya dimensi ketenagakerjaan, pendidikan maupun dimensi lainnya.
5. Koefisien gini dapat diuji secara statistik. Secara statistik, untuk memperoleh nilai koefisien gini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ialah dengan menerapkan *confidence interval* 95%. Teknik *bootstrapping interval* dapat dilakukan untuk kebutuhan tersebut.

Disamping itu, pengujian standar deviasi (penyimpangan) dapat dilakukan pula sebagai salah satu ukuran pengujian statistik. Untuk mempermudah langkah pengujian statistik tersebut, dalam penelitian menggunakan DASP (*Distributive Analysis Stata Package*).

Prosedur penentuan ukuran ketimpangan menggunakan pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (1997), Arsyad (1997) dan Todaro (2000), dimana:

1. Ketidakmerataan tinggi jika nilai koefisien Gini 0,50 - 0,70
2. Ketidakmerataan sedang jika nilai koefisien Gini 0,36 – 0,49
3. Ketidakmerataan rendah jika nilai Koefisien Gini 0,20 – 0,35

Secara visual distribusi pendapatan digambarkan dalam bentuk kurva Lorenz. Koefisien gini yang merepresentasikan distribusi pendapatan kemudian secara matematis dan statistik di gunakan untuk mengukur bidang grafik persentase kumulatif penduduk (termiskin hingga terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dapat ditemukan dimana saja. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Basri, 1995). Beberapa ahli ekonomi seperti: Kuznet (1955) dengan hasil penelitiannya di beberapa negara, demikian pula dengan

Adelman dan Morris (1973) serta Chenery dan Syrquin (1975), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu diikuti dengan meningkatnya kesenjangan terutama pada tahap awal proses pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini telah mengembangkan anggapan yang menyatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu *trade-off*, dimana pertumbuhan ekonomi yang pesat akan membawa konsekuensi meningkatnya ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sebaliknya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup baik akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat atau pada saat pertumbuhan ekonomi menurun.

Williamson tahun 1965 (Mudrajad Kuncoro, 2004) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Hasil penelitian ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah di mana disparitas berkurang dengan signifikan.

Penelitian lainnya yang serupa, Ahluwalia (Sadono Sukirno, 1985) menganalisis distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, di mana memberikan gambaran keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Dalam analisis distribusi pendapatan memberikan gambaran

mengenai distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan kepada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah persentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya. Ahluwalia menggolongkan penerima pendapatan dalam tiga golongan yaitu : 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut hasil penyelidikannya negara-negara komunis 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah menerima 25 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Di negara maju golongan penduduk ini menerima kurang lebih sebesar 16 persen, sedangkan di negara-negara berkembang mereka hanya menerima kurang lebih 12,5 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi pendapatan yang paling merata terdapat di negara-negara berkembang.

Dalam analisis mengenai pertumbuhan ekonomi, gambaran yang lebih penting yang perlu diperoleh mengenai keadaan distribusi pendapatan adalah ciri-ciri dari perkaitan diantara pembangunan ekonomi dan corak perubahan dari distribusi pendapatan. Dengan menggunakan data 18 negara diantaranya tiga negara maju (Perancis, Finlandia, Kanada) dan satu negara adalah negara komunis (Bulgaria), Ahluwalia membandingkan tingkat pertumbuhan dari 40 persen penduduk yang pendapatannya paling rendah dengan tingkat pertumbuhan

pendapatan nasional dari masyarakat tersebut. Di enam negara yaitu Taiwan, Bulgaria, Iran, Srilangka, Colombia, dan Kanada, tingkat pertumbuhan pendapatan dari 40 persen penduduk berpendapatan terendah melebihi tingkat pertumbuhan Produk Nasional Bruto. Di satu negara yaitu Korea Selatan tingkat pertumbuhan dari kedua-duanya adalah bersamaan. Di antara negara-negara ini terdapat negara-negara yang tingkat pembangunan ekonominya sangat maju, yaitu: Taiwan, Bulgaria, Iran, dan Korea Selatan. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi yang sangat maju dapat pula diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun demikian, keadaan ini bukanlah suatu kecenderungan yang pada umumnya berlaku. Di banyak negara berkembang pembangunan ekonomi menimbulkan distribusi pendapatan yang makin timpang. Di sebelas negara lainnya pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat lebih maju daripada pertumbuhan dari pendapatan 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Diantaranya terdapat negara-negara yang tingkat pembangunannya lebih lambat daripada negara-negara yang distribusi pendapatannya menjadi lebih baik pada taraf pembangunan yang lebih tinggi. Keadaan ini selanjutnya membuktikan pula bahwa pembangunan ekonomi yang lambat tidak selalu disertai dengan perubahan distribusi pendapatan yang lebih menguntungkan kepada penduduk yang berpendapatan paling rendah (Sadono Sukirno, 1985).

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Heri Susilowati (2010) mengenai distribusi pendapatan berdasarkan pengeluaran konsumsi, distribusi pendapatan antar wilayah (propinsi) di Indonesia berkisar antara 0,259-0,412, hanya propinsi Papua yang termasuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang, sementara

wilayah yang lain termasuk kategori ketimpangan ringan. Sementara itu, hasil penelitian Adnyana dan Suhaeti (2003) menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur terjadi ketimpangan pendapatan berat (indeks gini 0,5915), ketimpangan pendapatan di propinsi DKI Jakarta (indeks gini 0,4812) dan Jawa Barat (indeks gini 0,3526) termasuk sedang, dan ketimpangan di Propinsi Bali (indeks gini 0,1897) termasuk dalam ketimpangan rendah.

Ardito Bhinadi (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa mengemukakan bahwa hasil regresi untuk Jawa dan Luar Jawa menggunakan PDRB per kapita migas riil menunjukkan bahwa perbedaan angka pertumbuhan per kapita riil antara Jawa dan Luar Jawa terutama disebabkan oleh perbedaan produktivitas faktor total. Dengan menggunakan PDRB per kapita non migas riil metode *Fixed Effect* memberikan hasil yang hampir sama. Pertumbuhan dan pertumbuhan kualitas SDM bertanda positif, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja bertanda negatif. Perbedaan angka pertumbuhan antara Jawa dan Luar Jawa disebabkan oleh pertumbuhan kapital. Hasil pengujian secara statistik memberikan hasil bahwa tidak terdapat disparitas pertumbuhan pendapatan per kapita antara Jawa dengan Luar Jawa. Perbedaan terjadi pada angka rata-rata pertumbuhan pendapatan regional antara Jawa dengan Luar Jawa tidak signifikan secara statistik.

Lulus Prapti NSS (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun secara keseluruhan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah relatif rendah (masih di bawah angka 0,3) namun fenomena adanya keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan

ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk juga terjadi di sebagian besar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Selama periode tahun 2001-2004, sebagian besar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah mengalami pergeseran tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan (pergeseran posisi kuadran). Namun dari analisis juga ditemukan adanya sejumlah Kabupaten/ Kota yang tidak pernah mengalami pergeseran posisi kuadran atau statis.

Bosman Pangaribuan (2005) tentang analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Blora menyatakan bahwa berdasarkan analisis Indeks Williamson Kabupaten Blora dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan. Indeks Williamson menunjukkan rata-rata 0,314 selama tahun pengamatan. Angka ini masih dibawah ambang kritis 0,5.

Sutarno (2003) tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas (1993-2000) menyatakan bahwa berdasarkan Tipologi Klassen, daerah/ kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan/ daerah cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/ daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/ daerah tertinggal. Pada periode pengamatan 1993-2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan baik dianalisis dengan Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.

Suroso dkk (2005) dalam penelitiannya menemukan ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas tahun 2005 dengan koefisien gini sebesar 0,432. Koefisien gini tersebut mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar.

Beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Peneliti	Penelitian	Hasil Analisis
1	Williamson (1965)	Hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi	Hasil penelitian Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjasi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dilihat dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antardaerah di mana disparitas berkurang dengan signifikan.
2	Ahluwalia (dalam Sadono Sukirno, 1985)	Dsitribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang	Menurut hasil penyelidikan Ahluwalia, negara-negara komunis ; 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah menerima 25 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Di negara-negara maju golongan penduuduk ini menerima kurang lebih sebesar 16 persen, sedangkan di negara-negara berkembang mereka hanya menerima kurang lebih sebesar 12,5 persen dari keseluruhan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi pendapatan yang paling merata terdapat di negara-negara berkembang.
3	Sri Heri Susilowati (2010)	Distribusi pendapatan berdasarkan pengeluaran konsumsi, distribusi pendapatan antar	Menurut penelitian Sri H. S; distribusi pendapatan antar wilayah (propinsi) di Indonesia berkisar antara 0,259-0,412, hanya propinsi

		wilayah (propinsi) di Indonesia	Papua yang termasuk dalam kategori ketimpangan pendapatan sedang, sementara wilayah yang lain termasuk kategori ketimpangan ringan.
4	Adnyana dan Suhaeti (2003) menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur	Penerapan indeks gini untuk mengidentifikasi tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pedesaan di wilayah Jawa dan Bali	Menurut penelitian dari Adnyana dan Suhaeti menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Timur terjadi ketimpangan pendapatan berat (indeks gini 0,5915), ketimpangan pendapatan di propinsi DKI Jakarta (indeks gini 0,4812) dan Jawa Barat (indeks gini 0,3526) termasuk sedang, dan ketimpangan di Propinsi Bali (indeks gini 0,1897) termasuk dalam ketimpangan rendah.
5	Ardito Bhinadi (2003)	Disparitas pertumbuhan ekonomi Jawa dengan Luar Jawa	Ardito Bhinadi mengemukakan bahwa perbedaan angka pertumbuhan perkapita riil antara Jawa dan Luar Jawa terutama disebabkan oleh perbedaan produktivitas faktor total.
6	Lulus Prapti (2006)	Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di Jawa Tengah	Dalam penelitiannya Lulus Prapti menemukan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah masih tergolong rendah (masih di bawah angka 0,3). Meskipun di Jawa Tengah tingkat kesenjangan masih tergolong rendah tetapi terjadi fenomena adanya keterkaitan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan terjadinya kenaikan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di sebagian Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Selain itu pula dalam penelitiannya Lulus P yang menggunakan kuadran tipologi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan menyimpulkan bahwa selama periode tahun 2001-2004, sebagian besar Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah mengalami pergeseran tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan

			(pergeseran posisi kuadran). Namun dari analisis juga ditentukan adanya sejumlah Kabupaten/ Kota yang tidak pernah mengalami pergeseran posisi kuadran atau statis.
7	Bosman Pangaribuan (2005)	Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Blora	Dengan menggunakan Indeks Williamson diketahui bahwa wilayah kecamatan di Kabupaten Blora dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan. Dengan menggunakan Indeks Williamson angka ketimpangan di Kabupaten Blora menunjukkan rata-rata 0,314 selama tahun pengamatan. Angka ini masih dibawah ambang kritis 0,5
8	Sutarno (2003)	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas (1993-2000)	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Tipologi Klassen, daerah/ kecamatan di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan pada pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya, yaitu: kecamatan/ daerah cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/ daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/ daerah tertinggal. Selama tahun pengamatan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil ada kecenderungan mengalami peningkatan ketimpangan. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan oleh konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.
9	Suroso (2005)	Ketimpangan distribusi di Kabupaten Banyumas tahun 2005	Dalam penelitiannya menemukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas tahun 2005 dengan koefisien gini sebesar 0,432. Koefisien gini tersebut mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar.

Salah satu penelitian di atas, yaitu penelitian Lulus Prapti NSS menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian tentang keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Jawa Tengah. Pembahasan

dalam penelitian ini ada sedikit perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Lulus Parpti yaitu dalam penelitian ini selain mengamati keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan, juga membahas keterkaitan antara pendapatan perkaita dengan kesenjangan pendapatan. Selain itu dalam penelitian ini juga membagi kelompok masyarakat penerima pendapatan ke dalam 5 bagian menjadi 20 persen pertama, kedua dan seterusnya. Pembagian ini nantinya digunakan untuk melukiskan korva Lorenz.

### **2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dalam penelitian ini yang mengkaji keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/ kota di Jawa Tengah, kuadran tipologi digunakan untuk mengklasifikasikan kabupaten/ kota di Jawa Tengah menjadi 4 kategori yaitu:

1. Kuadran 1, yaitu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat tinggi.
2. Kuadran 2, yaitu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat tinggi
3. Kuadran 3, yaitu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat rendah
4. Kuadran 4, yaitu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat rendah.

**Gambar 2.4**  
**Diagram Tipologi Empat Kuadran antara Pertumbuhan Ekonomi**  
**dan Indeks Gini dan Kurva Kuznets**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel ketidakmertaan pendapatan yang dihitung dengan menggunakan indeks gini, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Untuk lebih jelasnya ketiga variabel tersebut terurai dalam penjelasan berikut:

##### **1. Ketidakmerataan Pendapatan (IG)**

Distribusi pendapatan merupakan pembagian hasil akhir kerja seluruh proses ekonomi dalam bentuk pendapatan nasional kepada lapisan-lapisan masyarakat. Ukuran ketidakmerataan pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat kesenjangan pendapatan. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai Indeks Gini mendekati satu maka kesenjangan pendapatan semakin besar, sedangkan jika mendekati nol maka kesenjangan pendapatan semakin kecil atau distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan kebutuhan analisis tersebut, selanjutnya pendapatan sebagai variabel yang merepresentasikan pendapatan menggunakan *proxy* pengeluaran, sebagaimana yang dilakukan untuk menghitung tingkat kemiskinan nasional, provinsi, kabupaten maupun kota. Pengeluaran yang digunakan merupakan pengeluaran konsumsi bulanan, baik untuk bahan makanan maupun pengeluaran non makanan. Sebagai variabel kontrol

digunakan *proxy* ukuran rumah tangga yang merupakan jumlah anggota rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pada dasarnya untuk menghitung ketidakmerataan pendapatan ini menggunakan 2 variabel pokok, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ukuran rumah tangga.

**a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran konsumsi makanan, minuman dan tembakau selama seminggu terakhir dan pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan 12 bulan terakhir. Informasi tersebut digunakan untuk menghitung besarnya konsumsi atau pengeluaran bulanan yang merepresentasikan pendapatan masing-masing rumah tangga.

**b. Ukuran Rumah Tangga**

Ukuran Rumah Tangga merepresentasikan tingkat ketergantungan atau beban rumah tangga.

**2. Pertumbuhan Pendapatan Regional (G PDRB)**

Pertumbuhan pendapatan regional non migas atas dasar harga konstan adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB riil dalam jangka panjang diluar minyak dan gas bumi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Dalam

penelitian ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2000. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

### **3. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi antara pendapatan regional (PDRB) suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (BPS, 2003: 4).

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan data set SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) Panel. Data tersebut terdiri dari 2 klasifikasi yaitu SUSENAS Kor dan Modul. SUSENAS Kor memuat berbagai informasi yang terkait dengan rumah tangga dan individu sedangkan SUSENAS Modul mencakup informasi yang terkait dengan konsumsi rumah tangga. SUSENAS Panel merupakan data hasil survey yang dilakukan secara periodik setiap tahun pada bulan Maret dengan sampel survey yang sama. Survey tersebut merupakan survey reguler yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain data SUSENAS Panel, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2007 dan 2008, PDRB Jawa Tengah Tahun 2008, Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2008 dan 2009.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan dari kantor statistik (BPS) maupun melalui literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

### 3.4. Metode Analisis Data dan Pendekatan Penelitian

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang menggambarkan kemiskinan relatif. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, distribusi pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga total. Hal ini disebabkan oleh sulitnya memperoleh data pendapatan. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan indeks gini.

#### 3.4.1. Pendekatan Koefisien Gini Rasio

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menghitung ketimpangan distribusi, baik distribusi pendapatan maupun dimensi lain dalam ekonomi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

atau

$$KG = 1 - \sum_1^n f_i(Y_i + Y_{i+1})$$

Keterangan:

KG= Koefisiensi Gini

$X_i$  = Proporsi jumlah Rumah Tangga Kumulatif dalam kelas i

$f_i$  = Proporsi jumlah Rumah Tangga dalam kelas i

$Y_i$ = Proporsi jumlah pendapatan Rumah Tangga kumulatif dalam kelas i

Secara konseptual, pendekatan analisis distribusi pendapatan memenuhi 5 kriteria sebagai pendekatan analisis distribusi pendapatan yang baik. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya 5 hal pokok syarat analisis distribusi telah terpenuhi (BPS, 2009), dimana:

6. Koefisien Gini tidak tergantung pada nilai rata-rata. Setiap perubahan secara proporsional antar golongan pendapatan tidak berpengaruh pada distribusi pendapatan, mengingat sebagai acuan analisisnya adalah kelompok pendapatan.
7. Koefisien Gini tidak tergantung pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk sebagai obyek analisis namun tidak mempengaruhi nilai koefisien Gini, kelompok pendapatan merupakan acuan dasar analisisnya.
8. Koefisien gini bersifat simetris. Perubahan lokasi obyek analisis tidak serta merta merubah koefisien Gini pendapatan secara agregat, namun hal tersebut dapat merubahan koefisien gini pada golongan pendapatan tertentu dan di wilayah tertentu jika perubahan lokasi obyek analisis cukup besar.

9. Koefisien Gini dapat didekomposisi. Pengelompokan obyek analisis berdasarkan latar belakang atau dimensi tertentu dapat dilakukan, misalnya dimensi ketenagakerjaan, pendidikan maupun dimensi lainnya.
10. Koefisien Gini dapat di uji secara statistik. Secara statistik, untuk memperoleh nilai koefisien gini yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ialah dengan menerapkan *confidence interval* 95%. Teknik *bootstrapping interval* dapat dilakukan untuk kebutuhan tersebut. Disamping itu, pengujian standar deviasi (penyimpangan) dapat dilakukan pula sebagai salah satu ukuran pengujian statistik. Untuk mempermudah langkah pengujian statistik tersebut, dalam penelitian menggunakan DASP (*Distributive Analysis Stata Package*). DASP adalah alat analisis yang tergabung dalam software Stata yang digunakan untuk membantu para peneliti dan analis kebijakan dalam memandu analisis *distributive*. Kegunaan DASP antara lain untuk:
  1. Untuk menghitung tingkat kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan sosial, dan keadilan (equity)
  2. Menghitung diferensiasi dalam penghitungan statistik
  3. Menghitung standard errors dan confidence interval dengan penghitungan menyeluruh dari suatu perencanaan survey
  4. Memperkuat analisis *distributive* yang terdiri lebih dari satu data base

5. Menunjukkan tingkat kemiskinan dan prosedur dekomposisi
6. Memeriksa *ethical robustness* dari perbandingan *distributive*
7. Menggabungkan syntax dan parameter; yang menggunakan prosedur penghitungan yang berbeda-beda pada analisis *distributive*.

Prosedur penentuan ukuran ketimpangan menggunakan pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro (1997), Arsyad (1997) dan Todaro (2000), dimana:

4. Ketidakmerataan tinggi jika nilai koefisien Gini 0,50 - 0,70
5. Ketidakmerataan sedang jika nilai koefisien Gini 0,36 – 0,49
6. Ketidakmerataan rendah jika nilai Koefisien Gini 0,20 – 0,35

#### 3.4.2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$$Y = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

Y = Tingkat pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$  = PDRB Kabupaten X tahun t

$PDRB_{t-1}$  = PDRB Kabupaten X sebelum tahun t

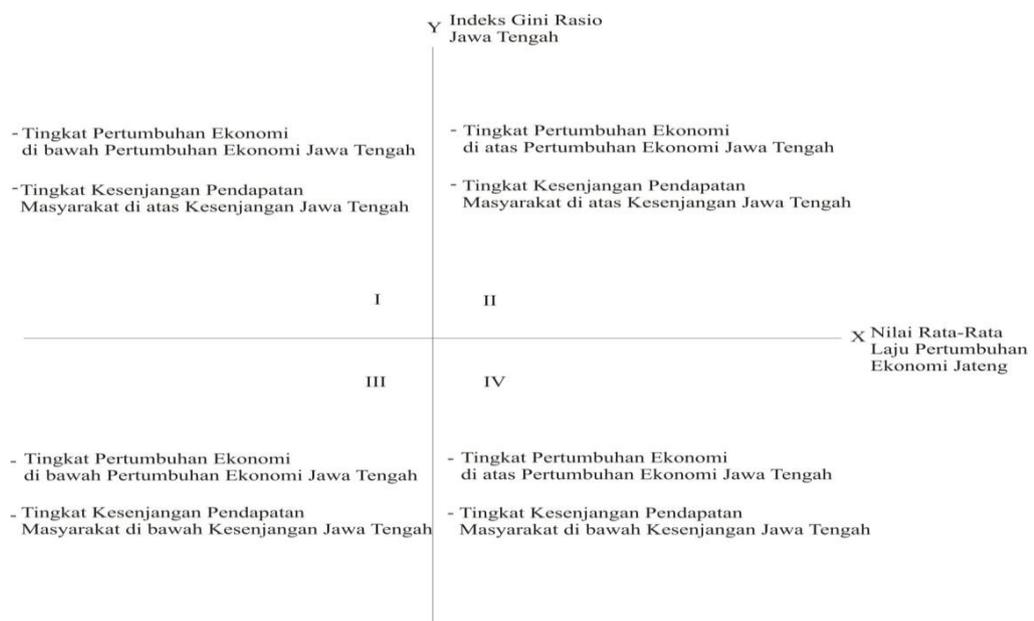
#### 3.4.3. Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola perkembangan keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat

kesenjangan pendapatan masyarakat dalam periode waktu dua tahun. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka alat analisis data yang digunakan adalah dengan memanfaatkan alat analisis Tabel Kuadran Tipologi. Adapun Tabel Kuadran Tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

**Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi  
Dengan Tingkat Kesenjangan Pendapatan**



- Kuadran I adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi.
- Kuadran II adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan pendapatan juga tinggi.

- Kuadran III adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi.
- Kuadran IV adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat kesenjangan pendapatan tinggi.